

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberitaan netralitas Presiden mengenai Pemilu 2024 ini menjadi sorotan publik. Bahwa isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 ini tidak dapat dipisahkan dari upaya reformasi besar-besaran yang dilakukan Indonesia sejak akhir 1990-an menitikberatkan pada upaya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN dianggap sebagai salah satu akar permasalahan yang menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Adryamarthanino & Ningsih, 2022).

Pada 24 Januari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa seorang presiden beserta menteri – menteri diperbolehkan untuk berkampanye dan memilih dalam pemilihan umum 2024 mendatang dengan catatan presiden/menteri tidak menggunakan fasilitas negara dalam proses kampanye. Secara hukum, pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut. Berlandaskan aturan pada Pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 2017 mengenai Pemilihan Umum, terdapat pembatasan yang jelas terhadap presiden serta wakil presiden dalam melakukan *campaign*. Selain itu, Pasal 300 UU Pemilihan Umum juga menetapkan batasan yang harus diperhatikan agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan negara, khususnya dalam penggunaan fasilitas negara (Nugraheny D. E. & Ihsanuddin, 2024). Pemberitaan mengenai netralitas ini menjadi pemberitaan krusial sebab setiap media menyajikan dari sudut pandang yang bermacam-macam.

Pemberitaan netralitas presiden dalam Pemilu 2024 menjadi salah satu isu yang trending topik di beberapa media sekaligus isu yang mendapatkan sorotan publik, berdasarkan laman kompas.com pada 25 Januari 2024, terdapat sejumlah media asing ikutserta yang mengangkat isu netralitas Presiden Indonesia pada Pilpres 2024 salah satunya sebuah artikel yang diterbitkan oleh Asia News Network (ANN) pada 3 November 2023 yang berjudul “*Indonesia’s Executive Branch Impartiality in Question After Apparent Endorsements of 2024*”

*Candidates*” menjelaskan bahwa sumber dari *Singapore* menyebutkan Presiden Joko Widodo beserta keanggotaan lembaganya diduga melanggar prinsip yang ada yakni netralitas dalam Pemilu 2024 (Puspapertiwi & Pratiwi, 2024).



Hal itu juga memunculkan beberapa kritikan dari beberapa civitas akademika terhadap persoalan langkah Presiden Joko Widodo yang dianggap telah keluar dari rel demokrasi. Beberapa kampus yang menyampaikan seruan moral secara terbuka untuk Presiden Joko Widodo dalam menyoroti permasalahan demokrasi antara lain civitas akademika dan alumni Universitas Airlangga yang menggelar aksi “Unair Memanggil” pada 5 Februari 2024 di halaman Sekolah Pascasarjana Unair, Surabaya yang menyuarakan agar Presiden Jokowi dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika demokrasi. Kemudian, civitas akademika Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menggelar deklarasi “Seruan Moral Kalijaga” pada 5 Februari 2024 di Halaman Laboratorium Agama UIN Suka Yogyakarta, dan beberapa yang lainnya (Republika.co.id, 2024).

Kemudian Presiden Joko Widodo kembali menyatakan di keterangan pers di Sumatera Utara yang ditampilkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 7 Februari 2024 bahwa sesuai dengan Undang-Undang, presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye, namun ia menegaskan bahwa tidak akan mengambil bagian dalam kampanye tersebut. Dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak memilih dalam Pilpres 2024 ini secara langsung mengunjungi tempat pemungutan suara (TPS) di tanggal 14 Februari 2024 (Kompas.com, 2024). Hal ini menyebabkan pemberitaan tentang netralitas presiden dalam pemilu 2024 menjadi topik hangat dan sering kali menjadi trending topik pemberitaan media *online* Indonesia.

Pemilu 2024 menjadi pemberitaan isu politik yang semakin menghangat di tanah air. Pada tanggal 27 November 2023, KPU menyelenggarakan Deklarasi Kampanye Damai untuk Pemilu 2024. Acara tersebut menampilkan tiga tim dari calon presiden serta wakil presiden dalam Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming (nomor urut 2), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3). Periode campaign untuk Pilpres 2024 dilakukan dari 28 November 2023 sampai dengan

10 Februari 2024. Diprediksi bahwa pemilih yang didominasi oleh generasi muda berusia 20-33 tahun akan mencapai sekitar 56% dari total pemilih secara nasional, yang setara dengan sekitar 114 juta orang. (bbc.com, 2023). Pada 16 Oktober 2023, MK memberi keputusan dalam menegaskan bahwa kriteria usia untuk capres serta cawapres ialah di bawah 40 tahun. Keputusan ini secara langsung memungkinkan Gibran Rakabuming Raka adalah seorang anak Presiden Jokowi untuk menjadi kandidat cawapres termuda di Indonesia pada pemilihan presiden 2024 berusia 36 tahun. (bbc.com, 2023).

Tabel 1. 1 Analisis Artikel Berita Kompas.com dan Republika.id

No	Kompas.com	Republika.id
1	<p>Singgung Sikap Jokowi, Komarudin Watubun: Kan Anaknya Cawapres, Kalau Bapaknya Kampanye Itu Pertama di Dunia 24 Januari 2024</p>  <p>Tangkapan Layar Berita Kompas.com</p>	<p>Presiden Boleh Memihak, PDIP: Pernyataan Jokowi Anggota Parpol/Presiden? 24 Januari 2024</p>  <p>Tangkapan Layar Berita Republika.co.id</p>

Sumber : Website Kompas.com & Republika.co.id, 2024

Berdasarkan data diatas, kedua media tersebut memiliki *headline* judul yang sama, dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di Kompas.com pada 24 Januari 2024 dengan judul "Singgung Sikap Jokowi, Komarudin Watubun: Kan Anaknya Cawapres, Kalau Bapaknya Kampanye Itu Pertama di Dunia" yang membahas pernyataan Komarudin Watubun selaku Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P menjelaskab jika Presiden Jokowi tidak serta dalam melakukan kampanye karena salah satu calon wakil presiden ialah anak sulung, Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024. Dirinya juga membahas bagaimana Presiden Jokowi menekankan seluruh pejabat publik untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Dalam hal ini, Kompas.com terhadap berita ini berupaya untuk menyiarkan

berita yang dikemas secara informatif dengan menggunakan beberapa narasumber dan beberapa artikel menuai kritikan untuk Presiden Jokowi. Sedangkan, media *online* Republika.id pada tanggal 24 Januari 2024 yang berjudul “Presiden Boleh Memihak, PDIP: Pernyataan Jokowi Anggota Parpol/Presiden?” yang membahas pernyataan Komarudin Watubun selaku ketua DPP Bidang Kehormatan DPP PDIP yang mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi terkait keberpihakan dalam Pilpres 2024. Dirinya juga mempertanyakan posisi Jokowi saat berbicara hal tersebut sebagai anggota parpol atau presiden, serta mengingatkan Jokowi untuk menjadi etika dan moral dalam menjalankan periode terakhirnya sebagai Presiden.

Berdasarkan penelusuran melalui *Google*, pada hari yang sama Republika mengunggah 23 berita untuk merespons pernyataan Jokowi. Bahwasannya, walaupun pemilik media Republika.co.id pro terhadap Jokowi dan Prabowo-Gibran, namun Republika tetap menyajikan berita dari berbagai sumber, mulai dari politisi dari partai pendukung Prabowo-Gibran, TKN Prabowo-Gibran, kubu Anies-Imin, kubu Ganjar-Mahfud, dan pengamat politik. Bahwasanya, kedua media memiliki perbedaan dalam melakukan pengemasan berita mengenai pemberitaan netralitas presiden dalam Pemilu 2024. Hal ini dipengaruhi bagaimana jurnalis/media yang menaungi dalam menceritakan sebuah peristiwa sehingga menghasilkan sebuah berita dari hasil konstruksi realitas media tersebut. Dari perbedaan tersebut menarik peneliti untuk mengetahui bagaimana *framing* atau pembedaan berita diliput media Kompas.com serta Republika.co.id.

Pada analisis ini akan melaksanakan penganalisa terhadap 10 artikel dari kedua media 10 artikel yang dipilih mempunyai aspek yang lengkap di dalam penulisannya dan menjadikan peneliti mendapatkan dengan menganalisis perangkat *framing* yang dikemukakan ahli Gerald M. Kosicki serta Zhongdang Pan. Pemilihan 20 berita dari 2 sumber media online yang memenuhi kriteria berbasis waktu dan kronologi yang sebanding yakni tanggapan dari beberapa sumber seperti pemerintah, partai politik/DPR, dan pengamat terhadap netralitas presiden dalam Pemilu 2024 yang dipilih pada periode November 2023 – Februari 2024 yakni untuk melihat pembedaan kedua portal berita dalam memberitakan

isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 pada sebelum masa kampanye, masa kampanye, pasca masa kampanye.



Gambar 1. 1 Negara yang Menggelar Pemilu pada 2024 (DataIndonesia.id, 2024)

Tahun 2024 merupakan tahun politik paling besar di dunia. Terdapat sekitar 60 negara lebih di dunia yang turut menggelar Pemilu pada tahun 2024 salah satunya Indonesia. Dilansir dari situs DataIndonesia.id, bahwa berdasarkan perhitungan Bloomberg Economics menunjukkan jumlah penduduk dunia yang turut serta dalam Pemilu tahun ini mencapai lebih dari 3,2 miliar jiwa atau setara 41% dari jumlah total penduduk dunia. Negara - negara dengan populasi besar dalam Pemilu 2024 yakni Indonesia, Amerika Serikat, India, Pakistan, Bangladesh, Meksiko, dan Rusia. Dalam hal ini, dapat dikatakan skala yang masif pada pemilu 2024 diperkirakan dapat memengaruhi kontestasi geopolitik dan ekonomi dunia (Pratiwi, 2024). Negara – negara yang melaksanakan sistem pemilihan umum memiliki beberapa fungsi yaitu sarana legitimasi politik dalam mewadahi format pemilihan umum yang berlaku, kemudian dari pemilihan umum ini mengartikan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi warga negaranya, dan para penguasa dituntut untuk dapat melakukan sebuah kesepakatan dari rakyat guna mempertahankan legitimasinya (Sarjiyati, Haryani, & Sutrisno, 2021). Pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan waktu yang istimewa bagi media massa, baik elektronik maupun cetak, untuk menyajikan berita.

Dalam pembahasan netralitas pada pelaksanaan pemilu ini tentu penting dipahami, berdasarkan KBBI mengartikan “netral” sebagai “tidak memihak (tidak membantu salah satu pihak)”; dari sinilah konsep netralitas berasal. Oleh karena itu, sikap dan keadaan yang tidak memihak (bebas) itulah yang kita maksud ketika

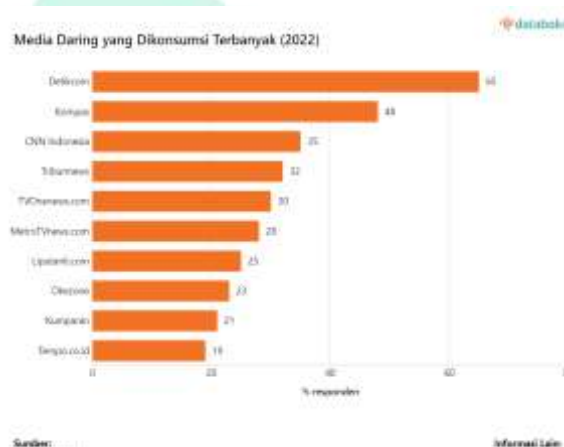
berbicara tentang netralitas. Individu tersebut menahan diri untuk tidak mengambil sikap terhadap isu-isu yang berpotensi mengadu domba kelompok atau organisasi lain (Sarjiyati, Haryani, & Sutrisno, 2021). Dengan demikian, netralitas menjadi prinsip yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan pada pelaksanaan pemilu. Pemberitaan mengenai netralitas presiden dalam Pemilu 2024 seringkali menjadi fokus utama atau berita teratas dari media massa, setiap informasi yang disiarkan media massa dalam liputan suatu kejadian atau isu tentu akan mempengaruhi sudut pandang atau perspektif yang media punya. Sehingga, *framing* dilakukan untuk menjadi acuan bagi kajian ilmu komunikasi untuk memahami bagaimana cara media membingkai sebuah pemberitaan.

Berdasarkan itu peran *online* media menjadi esensial pada sebuah berita. Media *online* ialah media yang disampaikan melalui platform daring atau situs web yang dapat diakses melalui internet. (Romli, 2018, p. 34). Menurut Johnson dan Kaye dalam (Romli, 2018, p. 40) menyebutkan hasil surveinya dalam pengguna internet secara politik, bahwa media *online* dianggap sebagai media yang sangat kredibel seperti media tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pandangan khalayak luas terhadap suatu informasi terbentuk dari yang terkandung dalam pemberitaan yang disebarluaskan oleh media *online*. Dalam konteks ini, pentingnya informasi yang disampaikan melalui media *online* menjadi sangat signifikan. Berita ialah suatu jenis informasi penting serta juga menarik untuk para pembaca (Muslimin, 2019, p. 18). Menurut Jani Yosef dalam (Muslimin, 2019, p. 18) mengartikan berita (Ni'am & Rastika, 2024) yaitu adalah pelaporan terkini yang berisikan mengenai fakta maupun pendapat yang menarik dan penting untuk khalayak yang disebarluaskan melalui media massa.

Kompas ialah salah satu koran terkemuka di Indonesia yang berpusat di Jakarta. Kompas didirikan pada 1965 oleh Jakoeb Oetama dan P.K Ojong. Kompas.com sendiri adalah perintis dalam media daring milik Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 14 September 1995, menyajikan versi daring dari konten berita harian Kompas yang publikasi pada hari yang sama. Pada tanggal 5 Agustus 1996, Kompas *Online* diluncurkan oleh PT Kompas Cyber Media (KCM). Kompas.com mengusung prinsip umum dengan motto "jernih" dalam melihat

dunia berupa menampilkan berita atau sajian informasi yang objektif tentang update perkembangan berita - berita terbaru (Kompas.com, 2024).

Republika.co.id merupakan jenis bentuk berita yang menghadirkan beragam jenis informasi pada format teks, video, serta audio yang dikembangkan dengan mengenakan teknologi hiperteks serta hipermedia (Republika.co.id, 2024). Pada tahun 2001, perusahaan ini dimiliki oleh Mahaka Group yang pendirinya adalah Erick Thohir dan Muhammad Lutfi. Republika memiliki ideologi nuansa islami, dan secara historis Republika dibentuk oleh ICMI (Arsam, 2014). Selain itu, pemilik saat ini dari Republika.co.id adalah sebuah tim sukses pendukung satu dari ketiga capres dan cawapres pada Pemilu 2024 (Chusna, 2024).



Gambar 1. 2 Media Daring yang Dikonsumsi Terbanyak (2022) (Databoks, 2022)

PENCARIAN "NETRALITAS PRESIDEN DALAM PEMILU"

About 132,000 results (0:12 seconds)

Gambar 1. 3 Mesin Pencarian Kompas.com (Kompas.com, 2024)

Penyebab penelitian menggunakan *online* media Kompas.com serta Republika.co.id disebabkan keduanya merupakan *platform web* berita *online* ydalamang menyajikan berita nasional serta internasional dengan cakupan yang luas dengan berbagai topik termasuk politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga pembacanya tersebar luas diseluruh Indonesia. Namun, perbedaan kedua media tersebut yakni terletak pada ideologi media bahwa Kompas.com memiliki reputasi

sebagai platform berita daring yang objektif dengan *tagline* 'Jernih Melihat Dunia'. Kompas.com dikenal sebab telah merevitalisasi dirinya sebagai media yang menyajikan jurnalisme terkini dan akurat kepada pembacanya di tengah arus informasi yang sering kali membingungkan dalam hal kebenaran (Kompas.com, 2024). Selanjutnya, dalam pencarian di mesin pencari, ditemukan 132.000 hasil terkait dengan kata kunci "Netralitas Presiden Dalam Pemilu" di situs Kompas.com. Ini menjadi pertimbangan tambahan bagi peneliti untuk memilih Kompas.com sebagai objek pengamatan, karena situs tersebut dianggap lebih fokus dan sering dalam melaporkan tentang netralitas presiden dalam Pemilu 2024.

Sedangkan, Republika.co.id awalnya hanya menjadi platform *online* Harian Republika untuk mencapai pembaca yang tidak terjangkau melalui koran cetak. Kehadiran Republika.co.id tidak bisa dipisahkan dari Harian Republika itu sendiri. Harian Republika sendiri muncul sebagai alternatif media cetak dengan perspektif Islam, yang di mana menurut historis dibangun oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sehingga dapat dikatakan media Republika.co.id berideologi nuansa islami (Rusli, Ahdan, & Idris, 2022). Selain itu, pada penelitian metode analisis *framing* mengenai berita netralitas presiden dalam Pemilu 2024 tujuan peneliti menggunakan media Republika.co.id ialah untuk mendapati apakah terdapat keterkaitan dari kedua aspek kepemilikan atas perusahaan media republika yaitu Erick Thohir ialah salah satu team sukses dari calon Presiden serta calon Wakil Presiden di pemilu 2024 (Chusna, 2024). Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan analisa untuk menjawab apakah kepemilikan induk perusahaan Republika ini bekerjasama dengan berita yang akan disebar. Bahwasanya, penelitian memilih Kompas.com serta Republika.co.id yang di mana asal sumber sebab keduanya mempunyai ideologi dan kepemilikan media yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut akan mempengaruhi bagaimana masing - masing media tersebut dalam membingkai pemberitaan.

Peran media dalam menyampaikan informasi terkait Pemilu kepada masyarakat sangatlah penting. Menurut Dr. Ihsan Hamid, seorang Pengamat Politik dari UIN Mataram, media massa memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kesuksesan Pemilu 2024 yang akan datang (Imansyah & Marboen,



2022). Ihsan juga menyampaikan bahwa media massa memiliki peranan penting untuk dapat menyampaikan proses verifikasi faktual yang diharapkan dapat sampai kepada khalayak luas, selain itu media juga memiliki peran untuk meluruskan dan menyaring informasi hingga menangkal *hoaks* dengan karya jurnalistik yang mengutamakan keberimbangan serta informasi yang disajikan akurat dan tepat. Seorang jurnalis dalam memuat sebuah pemberitaan tentunya akan melalui proses *framing* atau pembingkaiian sebuah berita. *Framing* merupakan bagaimana cara media mengkonstruksi realitas yang dimulai dari perspektif pembuat berita, teori ini dilakukan untuk memahami “logika” pengemasan berita dalam versi media itu sendiri (Khumaedi, 2020, hal. 6). *Framing* dalam pemberitaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi individu jurnalis dan kepemilikan media tersebut. Dengan demikian, seorang jurnalis diharapkan mematuhi pedoman kode etik jurnalistik sebagai landasan untuk memenuhi standar untuk memaparkan berita yang relevan dengan nilai dan norma-norma jurnalistik.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa studi sebelumnya sebagai referensi, salah satunya adalah penelitian berjudul "Analisa *Framing* Pemberitaan Survei Elektabilitas Calon Presiden Jokowi Vs Prabowo Di Media *Online* Republika.Co.Id Edisi April 2018" yang dilakukan oleh Nurul Husna. Penelitian ini memakai metode *framing* model Pan dan Kosicki, dan simpulan analisa datanya menunjukkan bahwa pada berita survey elektabilitas Jokowi Vs Prabowo pada media daring Republika.co.id pada bulan April 2018, terdapat kecenderungan Republika.co.id untuk mendukung Jokowi dalam penyajian berita. Pada penelitian ini memiliki perbedaan fokus peristiwa yang dibahas.

Penelitian kedua mengkaji *framing* pemberitaan media *online* Susilo Bambang Yudhoyono di Detik.com serta Kompas.com, yang berjudul “SBY dalam Bingkai Media Kompas.Com dan Detik.Com”. Dengan bantuan alat metode pembingkaiian Gerald M. Kosicki dan Zhongdang Pan, Aldo Alan Stepanus melakukan penelitian pasca Pemilu presiden tahun 2014. Berdasarkan data, Kompas.com dan Detik.com sama-sama memiliki bias terhadap Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjelek-jelekan Partai Demokrat, yang tercermin dari gaya bahasa yang digunakan, yang kemungkinan

mengakibatkan penurunan citra SBY. Penelitian ini memperhatikan perbedaan unit observasi dari kedua media daring yang berbeda.

Penelitian ketiga berjudul “Analisis *Framing* Konstruksi Pemberitaan Presiden Jokowi Terkait Persiapan Pemilu 2024 Di Media Kompas.Com Dan Republika.Co.Id” karya Irfan Rusli, Ahdan, dan Muhammad Idris merupakan penelitian ketiga yang menjadi landasan penelitian. Metode *framing* Zhongdang Pan serta Gerald M. Kosicki dipergunakan dalam meneliti, yakni pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan dan mengamati teks. Berdasarkan penelusuran data, pengumuman Presiden Joko Widodo mengenai pelaksanaan pemilu 2024 disajikan berbeda yaitu Kompas.com serta Republika.co.id. Dibandingkan situs oposisi, Kompas.com lebih suka mengutip pejabat pemerintah, sedangkan Republika.co.id cenderung memberikan lebih banyak kutipan dari pernyataan oposisi daripada pemerintah. Pada penelitian ini memiliki perbedaan yakni fokus fenomena yang diangkat dalam penelitian beraneka ragam. Penelitian terdahulu fokus meneliti terkait kesiapan Jokowi dalam Pemilu 2024, sedangkan penelitian ini fokus membahas netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana perbedaan *framing* antara media *online* Kompas.com dan Republika.co.id dalam membingkai berita netralitas presiden dalam Pemilu 2024?
2. Bagaimana media *online* Kompas.com dan Republika.co.id mengkonstruksi berita netralitas presiden dalam Pemilu 2024?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan *framing* pembingkai berita Kompas.com dan Republika.co.id.

2. Untuk mengetahui Kompas.com dan Republika.co.id dalam mengkonstruksi berita netralitas presiden dalam Pemilu 2024.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Dalam manfaat akademis, penelitian mengharapkan adanya penambahan pemahaman tentang metode *framing*, terutama dalam konteks jurnalisme *online*. Dan diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi untuk kajian - kajian Ilmu Komunikasi terutama untuk peneliti lainnya dalam memahami bagaimana media *online* menggunakan berbagai kerangka untuk membingkai dan mengkomunikasikan isu politik yakni pemberitaan netralitas presiden dalam Pemilu 2024.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Secara praktis, penelitian diharapkan bisa dimanfaatkan dalam pedoman atau acuan bagi para jurnalis dalam media *online* saat jurnalis akan melaporkan tentang isu-isu politik dan isu lainnya.
2. Kemudian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas mengenai pemahaman serta menjadi sumber referensi praktis bagi media pada saat menginterpretasi realitas yang disajikan di media *online*.